



**PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMUNAL DALAM PERSPEKTIF PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA**

TESIS

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

**ADINUL HAKIM
NIM. P2B123067**

**UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**JAMBI
2025**



**UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Tulisan ini diajukan oleh :

Nama : ADINUL HAKIM
NIM : P2B123067
Program Kekhususan : Hukum Pemerintahan
Judul : Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual
Komunal dalam Perspektif Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis
pada Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jambi

	Jambi, 20 Juni 2025
Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu

Dr. H. Syamsir, S.H., M.H.
NIP. 19630405 199802 1 001

Dr. Dony Yusra Pebrianto, S.H., M.H.
NIP. 19890223 201803 1 001



UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini disajikan oleh :
Nama : ADINUL HAKIM
Nomor Induk Mahasiswa : P2B123067
Program Kekhususan : Hukum Pemerintahan
Judul : Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual
Komunal dalam Perspektif Peraturan
Perundang-undangan di Indonesia

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis
Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi
pada tanggal 20 Juni 2025
dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. H. Taufik Yahya, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	
Dr. Dwi Suryahartati, S.H., M.Kn.	Sekretaris	
Dr. Hartati, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. H. Syamsir, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. Dony Yusra Pebrianto, S.H., M.H.	Anggota	

Menyetujui :
Dekan Fakultas Hukum,

Mengesahkan:
Ketua Program,

Dr. Hartati, S.H., M.H.
NIP. 19721203 199802 2 001

Dr. H. Taufik Yahya, S.H., M.H.
NIP. 19650107 199003 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini merupakan karya tulis saya yang asli dan belum pernah diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Seluruh isi karya tulis ini merupakan hasil gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa adanya bantuan dari pihak lain, kecuali bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing utama dan pendamping.
3. Dalam penulisan ini, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang saya ambil tanpa mencantumkan sumbernya secara tertulis sebagaimana mestinya, baik dalam isi naskah maupun dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan akademik, saya bersedia menerima sanksi, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah diberikan, serta sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi.

Jambi, 20 Juni 2025
Yang membuat pernyataan

Adinul Hakim
NIM P2B123067

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan Judul ***“Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”***.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi dimana hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang hendak menyelesaikan perkuliahannya. Dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dari segi substansi isi maupun kata-perkatanya sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang membangun agar kemudian tesis ini dapat menjadi lebih baik adanya.

Dalam penulisan tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga dalam kesempatan ini dengan rendah hati dan segala hormat penulis menyampaikan terimakasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan secara moril dan materil dan secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap pelaksanaan penelitian dan penulisan karya tulis tesis ini. Pada bagian ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Syamsir, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;

2. Dr. Dony Yusra Pebrianto, S.H., M.H, selaku Pembimbing pendamping, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
3. Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Jambi yang telah memfasilitasi dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyelesaian studi di Universitas Jambi;
4. Dr. Hartati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi dan sekaligus penguji utama yang telah memberikan motivasi, saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah di Universitas Jambi;
5. Dr. H. Taufik Yahya, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi sekaligus selaku ketua tim penguji, yang telah memfasilitasi dan memberikan masukan dan saran yang membangun;
6. Dr. Dwi Surya Hartati, S.H., M.Kn. selaku sekretaris penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian tesis ini.
7. Hj. Andi Najemi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan kemudahan dan motivasi kepada penulis untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Jambi;
8. Para Dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan dan membantu selama Penulis mengikuti perkuliahan Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi sampai dengan selesai;

9. Kedua orangtua tercinta, Ayahanda H. Baharuddin dan ibu Herlina yang selalu memberikan nasehat, dukungan dan do'a hingga penulis dapat menyelesaikan studi Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Jambi;
10. Isteri tercinta Susrenty Ulfa Ruska, S.Tr.Keb yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah mengikhlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi miliknya, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan;
11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi yang telah memberikan izin dan data empiris yang diperlukan untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian dalam tesis ini;
12. Kepada seluruh rekan-rekan yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan, semangat dan kerjasama saling membutuhkan dalam menyusun tesis ini sehingga selesai.

Penulis menyadari, bahwa tiada gading yang tak retak, bahwa manusia adalah tempatnya bersalah. Kiranya penyajian tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan penulisan ini. Semoga bermanfaat.

Jambi, 20 Juni 2025
Penulis,

Adinul Hakim
NIM P2B123067

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, tradisi, bahasa, dan sumber daya alam memiliki potensi besar dalam bidang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Potensi tersebut meliputi Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Indikasi Geografis yang diwariskan secara turun-temurun dan bernilai ekonomis serta kultural. Namun, pemanfaatan tanpa perlindungan yang memadai telah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti klaim sepihak oleh negara lain maupun eksploitasi komersial oleh pihak asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap KIK dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia serta merumuskan konsep ideal pengaturan ke depan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan konseptual, perundang-undangan, serta historis, ditemukan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi terkait KIK, namun pengaturannya masih tersebar dan bersifat sektoral tanpa adanya satu Undang-undang tentang perlindungan KIK yang komprehensif. Selain itu, implementasi perlindungan oleh pemerintah daerah masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi kewenangan dan sumber daya. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan norma hukum yang memberikan kepastian dan efektivitas perlindungan KIK, serta peran aktif pemerintah pusat dan daerah dalam penginventarisasian dan pelestarian KIK. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan perlindungan KIK di masa depan.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual Komunal, Perlindungan Hukum, Perundang-undangan, Kepastian Hukum, Pemerintah Daerah.

LEGAL PROTECTION OF COMMUNAL INTELLECTUAL PROPERTY IN THE PERSPECTIVE OF LEGISLATION IN INDONESIA

ABSTRACT

Indonesia, with its vast diversity of cultures, traditions, languages, and natural resources, holds immense potential in the realm of communal intellectual property (CIP). This includes traditional cultural expressions, traditional knowledge, genetic resources, and geographical indications that are passed down across generations and possess both economic and cultural value. However, insufficient legal protection has led to various issues, including foreign exploitation and unilateral claims by neighboring countries. This study aims to analyze the legal protection of CIP in the context of Indonesian legislation and propose a conceptual framework for future regulatory improvements. Using normative legal research methods with conceptual, statutory, and historical approaches, the study reveals that although several laws regulate aspects of CIP, they are fragmented and lack a comprehensive legal framework. Existing regulations primarily assign the duty of CIP inventory and preservation to the government, but without clear operational mechanisms, particularly at the regional level. Local governments, despite being closest to the traditional communities, often face challenges in authority, resources, and implementation. The study concludes that a more integrated, specific legal instrument is needed to ensure legal certainty and effective protection of CIP. Strengthening institutional roles, legal norms, and coordination between central and regional governments is essential to safeguard Indonesia's communal intellectual wealth. The findings are expected to contribute academically and offer policy recommendations for enhancing CIP protection in Indonesia.

Keywords: *Communal Intellectual Property, Legal Protection, Legislation, Legal Certainty, Regional Government.*